

BAB 1

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Alasan penulis memilih topik ini karena konflik dalam dunia internasional masih terus terjadi, terlebih konflik tersebut adalah konflik yang sama dan kerap terjadi di kawasan Timur Tengah sebagai kawasan rawan konflik. sehingga perlu adanya perhatian terhadap konflik tersebut, selain itu aktor yang bermain didalamnya adalah negara yang sama seperti Amerika, Rusia, Barat dan negara-negara besar lainnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kawasan ini merupakan ladang keotoriteran rezim, yang salah satu menjadikan kawasan ini sebagai sasaran untuk melakukan intervensi, sehingga dengan adanya konflik dimanfaatkan untuk melakukan penjajakan dikawasan ini. Disamping kepentingan negara yang ikut turun bermain dalam konflik mengakibatkan semakin sulit menemukan titik terang.

B. LATAR BELAKANG

Dewasa ini hampir semua negara-negara di dunia berkompetisi menjadi negara terbaik dengan memupuk kekuatan yang sebesar-besarnya. Tidak seperti pada saat perang dunia, dimana negara yang memiliki militer yang kuat disebut sebagai negara *super power*.¹ Yang mendapat julukan tersebut adalah Uni Soviet, Amerika, dan Britania Raya. Ketiga kekuatan besar dunia inilah yang memegang kendali saat itu. Berbeda dengan sekarang, makna *super power* tidak dilihat dari kekuatan militer saja, melainkan negara yang kuat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Predikat *super power* tidak selamanya disandang oleh negara yang sama, hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang masyarakat internasional yang lebih maju dan modern.

Uni Soviet sebagai *super power* pada perang dunia dan mengalami keruntuhan pada tahun 1991 menjadi tanda berakhirnya perang dingin, sehingga negara ini terpecah menjadi beberapa negara dan salah satu negara pewaris utama Uni Soviet adalah Federasi Rusia, mewarisi 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya.² Saat ini Rusia merupakan negara demokrasi dan pernah memproklamkan diri sebagai negara komunis pertama di dunia, menjadi negara yang cukup disegani oleh negara-negara didunia, dikarenakan Rusia mencoba mengembalikan kejayaan

¹ Super Power adalah negara yang mendominasi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa internasional. Dikutip dari http://nurlaili-azizah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-48318-Pengantar%20Hubungan%20Internasional-NATIONAL%20POWER.html diakses pada 9 September 2015.

² [Wikipedia.org/wiki/Rusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Rusia).

seperti yang didapat oleh Uni Soviet, dan memiliki *bergining position*³ yang sangat baik dalam kancah internasional.

Sebagai negara yang pernah mendapatkan predikat *super power* serta memiliki kekuatan militer yang cukup kuat, terbukti dengan keberhasilan Rusia menjadi raksasa militer dunia menyusul Amerika Serikat. Walaupun anggaran militer Amerika Serikat jauh lebih banyak dari Rusia, yakni rata-rata 524 juta dollar untuk AS dan 42,5 juta dollar untuk Rusia setiap tahunnya antara 2000-2008⁴. Kebangkitan kekuatan militer Rusia, di mulai ketika Presiden Vladimir Putin menjabat pada tahun 2000. Putin memprioritaskan pada sektor militer dalam kurun waktu satu dekade terakhir, hingga dewasa ini, Rusia mulai menempuh kebijakan strategis, guna memulihkan kondisi dalam negeri. Rusia masih tetap berusaha untuk mengembalikan pengaruhnya pasca Perang Dunia II, terutama dalam peningkatan kekuatannya, yang merupakan sektor vital negara⁵. hal ini dikarenakan power yang dimiliki Rusia cukup kuat dan hampir mengimbangi negara Amerika yang telah lama menyandang julukan sebagai negara *super power*, dibuktikan dengan kesamaan posisi mereka sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

³ Bergining position is the position of a person, group, or organization in a negotiation, with respect to their ability to achieve a deal which is favourable to themselves. <http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bargaining-position>.

⁴ Academia.edu/uploaded by Sabrina Mirza/komparasi profesionalisme militer Rusia-Amerika. Diakses pada 9 September 2015.

⁵ Academia.edu/uploaded by Sabrina Mirza/komparasi profesionalisme militer Rusia-Amerika. Diakses pada 9 September 2015.

PBB merupakan Organisasi Internasional yang didirikan pada tahun 1945 dengan beranggotakan 193 negara didunia⁶, sejak terjang organisasi ini dalam mewadahi negara-negara di dunia sudah 70 tahun lamanya, terdapat 6 organ utama yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.⁷ Dewan Keamanan PBB bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan negara-negara anggota PBB maupun bukan negara anggota, dikarenakan fungsi utama Dewan Keamanan PBB, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Semakin konfleksnya masalah-masalah yang bermunculan dalam dunia internasional mengharuskan negara-negara didalamnya mau tidak mau menjalin kerjasama baik kerjasama bilateral maupun multilateral guna untuk menyelesaikan masalah yang ada. Salah satu bagian penting dalam Dewan Keamanan PBB adalah lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap, 5 negara anggota tetapnya adalah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis dan Inggris.⁸ Kelima negara ini memiliki hak istimewa yaitu hak veto yang dapat diberikan kepada rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB, dalam mencapai sebuah kesepakatan, satu negara dihargai satu suara atau vote, namun apabila salah satu anggota tetap mengambil keputusan untuk menveto maka kesepakatan tidak akan dicapai, walaupun semua anggota tidak tetap menyepakatinya.

⁶ <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview>.

⁷ Jurnal oleh Benedictus Mega Herlambang “*peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah*” Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

⁸ dikutip dari <http://www.un.org/en/sc/> diakses pada 9 September 2015.

Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.⁹ Sepanjang sejarah penggunaan hak veto oleh Dewan Keamanan PBB seperti, Rusia tercatat sebagai negara yang menggunakan hak veto terbanyak untuk menentang keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan PBB. Rusia telah menggunakan hak vetonya sebanyak 122 kali, kemudian disusul oleh Amerika Serikat sebanyak 81 kali, Inggris sebanyak 32 kali, dan Prancis menggunakan hak vetonya sebanyak 18 kali, sedangkan Tiongkok menggunakan hak vetonya sebanyak 5 kali.¹⁰

Amerika Serikat juga sebagai salah satu pemilik hak veto dengan ideologi liberalis-kapitalis, berbeda dengan Rusia yang lebih ke sosialis-komunis, dengan ideologi yang berbeda menjadikan sekat antara kedua negara ini. Amerika Serikat adalah negara kuat dan maju di dunia internasional, serta memiliki banyak pengaruh dan sumber daya¹¹. Meskipun begitu Amerika Serikat masih dalam proses memulihkan dari krisis besar-besaran pada delapan tahun silam, dan menyesuaikan diri kepada perkembangan dunia yang kini *polisentris*¹² tetapi itu

⁹ Dikutip dari <http://www.un.org/en/sc/> diakses pada 9 September 2015.

¹⁰ Dikutip dari <http://www.islamicgeo.com/2011/09/hak-veto-sejarah-dan-penggunaannya.html>, Hak

Veto, Sejarah dan Penggunaannya. Diakses pada 9 September 2015.

¹¹ <http://indonesia.rbth.com/ditulis> oleh [Fyodor Lukyanov/Era Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia Setelah Perang Dingin](#) /di diakses pada 9 September 2015.

¹² Polisentris adalah anggapan bahwa pusat komunisme tidak terbatas pada satu tempat saja, tetapi terdapat di negara komunis masing-masing. Dikutip dari <http://kbbi.web.id/polisentrisme> diakses pada 30 Oktober 2015.

semua dapat ditutupi dengan peran Amerika di dunia internasional yang sangat mendominasi dengan kekuatan militernya.

Terbukti dalam kasus Suriah kedua negara ini sudah jelas terlihat memiliki strategi yang berbeda. Rusia mendukung pemerintah Suriah dikarenakan Rusia ingin mempertahankan mitra aliansi, dimana hubungan Rusia dengan Suriah sudah terjalin sejak zaman Uni Soviet.¹³ Rusia melalui menlunya, Sergei Lavrov mengingatkan bahwa oposisi yang dihadapi Suriah bukanlah rakyat sipil tanpa senjata melainkan kelompok bersenjata seperti al-Qaeda.¹⁴ Amerika dengan alasan kemanusiaan mendukung kelompok oposisi dan menyatakan akan berusaha membantu mengakhiri konflik Suriah, tentu saja melalui jalur militer.¹⁵ Ini yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat internasional apabila negara ini terus memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis terbukti Hubungan Rusia dengan Barat dan Amerika Serikat terus memburuk dengan adanya sanksi saling balas satu sama lain melalui kelompok yang didukung masing-masing negara tersebut.

Konflik terjadi sejak Januari 2011, dimana rakyatnya menuntut mundur Presiden Bashar al-Assad. Bermula sejak terjadinya banyak konflik di beberapa negara di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah *arab spring*¹⁶, seperti rakyat

¹³ ejournal.hi.fisip-unmul.org / Volume 2, Nomor 4, 2014: 1063-1078 tentang “*Analisis Intervensi Rusia Dalam Konflik Suriah*” oleh Ibrahim Noor. Diakses pada 11 September 2015.

¹⁴ A.Setiawan, “Dewan Keamanan Kembali Desak Resolusi Suriah”, DW(online), 2012 <http://www.dw.de/dw/article/0,,15805229,00.html>, diakses 1 Oktober 2015.

¹⁵ Internasional Okezone, “AS Persiapkan Aksi Militer Awal ke Suriah”, Okezone(online), 2012, <http://international.okezone.com/read/2012/03/08/414/589227/as-persiapkan-aksi-militer-awal-ke-suriah>, diakses 1 Oktober 2015.

¹⁶ Arab Spring adalah kebangkitan dunia arab. Tersedia pada <http://www.kompasiana.com/dahana/arab-spring-israel-dan-palestina> diakses 30 Oktober 2015.

Tunisia, Mesir, dan Libya yang berhasil menuntut mundur rezim otoriter di ketiga negara tersebut. Tuntutan ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Assad yang dianggap otoriter terbukti pada saat itu salah satu masyarakat membakar diri untuk menuntut rezim Assad yang berkuasa sejak tahun 2000. Bashar al-Assad pewaris kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad, yang berkuasa selama tiga dekade di Suriah. Revolusi Suriah telah banyak mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Menurut Sekretaris Jenderal untuk urusan politik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Lynn Pascoe, jumlah korban meninggal dari konflik Suriah mencapai 7.500 orang. Korban meninggal dunia melebihi 100 warga sipil setiap hari dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Pemerintah Suriah menyatakan kehilangan 1.345 pasukan keamanan dan sebanyak 2.493 warga sipil yang tewas.¹⁷

Hal ini kemudian mengundang Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan menangani kasus ini dan memicu negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memberikan sanksi kepada Suriah. Negara Barat yang dikepalai oleh Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara sekutu di Timur Tengah yang berada dalam naungan Dewan Keamanan PBB telah merampungkan draft resolusi untuk menerapkan embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Suriah

¹⁷ Hillary sebut Assad: Penjahat Perang, 29 Pebruari 2012 pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/02/29/m05agp-hillary-sebut-assad-penjahat-perang>, diakses 1Oktober 2015.

untuk menghentikan penindasan terhadap para penentang Presiden al- Assad.¹⁸ Sehingga segala bentuk intervensi tidak mendapat legitimasi dari PBB.

Pada tanggal 4 Oktober 2011, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi dengan nomor S/2011/612, diajukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengancam Pemerintah Suriah yang melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang menentang rezim Bashar Al Assad. Resolusi ini dirancang oleh Prancis bersama Inggris, Jerman, dan Portugal, hal ini juga mendapat dukungan dari sembilan anggota tetap Dewan Keamanan, namun pada akhirnya resolusi gagal karena dua negara yang memiliki hak veto, yakni Rusia dan Tiongkok mengeluarkan hak vetonya untuk menentang resolusi tersebut, sehingga penggunaan hak veto ini akan mempengaruhi hubungan Rusia dan Tiongkok dengan negara lain terutama anggota Dewan Keamanan PBB, dalam hal ini veto merupakan power bagi Rusia yang digunakan untuk mempengaruhi hubungan antar negara. Setelah menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan draft resolusi Dewan Keamanan PBB, pihak Rusia tetap dapat mengirimkan senjata ke Suriah dimana hubungan ekonomi dan militer antara keduanya sudah berlangsung sejak zaman Perang Dingin. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Antonov mengatakan Rusia tidak akan menghentikan ekspor senjata ke Suriah meskipun banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak terutama pihak Barat yang semakin dipersulit oleh tindakan Rusia ini. Antonov mengatakan, negaranya tidak

¹⁸ Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, "Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat Di Suriah" oleh

Irdyanti. Diakses 1 Oktober 2015.

melanggar kewajiban internasional dengan menjual senjata ke Damaskus.¹⁹ Menurut Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bahwa satu-satunya cara untuk mencapai solusi untuk krisis Suriah adalah dengan cara dialog, Lavrov menunjukkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata yang telah memborbardior unit-unit militer, fasilitas umum, dan gedung-gedung pemerintahan.²⁰

Karena konflik Suriah semakin melebar, pada 21 April 2012 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2043 untuk melakukan intervensi dengan mengirimkan sejumlah pasukan perdamaian yang sebagian besar di tempatkan di dataran tinggi Golan. Pasukan perdamaian tersebut tergabung dalam *United Nations Disengagement Observer Force* (UNDOF). Pasukan perdamaian PBB tersebut membantu pihak oposisi dan pemberontak yang telah melakukan aliansi dan mendapatkan pengakuan secara internasional untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang menolak untuk mengundurkan diri dari kursi pemerintahan Suriah. Resolusi yang di keluarkan oleh DK PBB juga memberikan kemudahan bagi Rusia untuk melakukan intervensi selain adanya, permintaan langsung yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah suriah. Sikap Rusia yang secara tegas membela Suriah dalam Dewan Keamanan PBB dan hubungan bilateral yang semakin baik menjadi suatu bentuk kebijakan luar negeri Rusia. Terhitung sejak dikeluarkannya resolusi oleh Dewan Keamanan PBB.

¹⁹ Tolak Resolusi Sanksi PBB, Rusia Tetap Jual Senjata ke Suriah, tersedia pada <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/02/03/lyt4nr-tolak-resolusi-sanksi-pbb-rusia-tetap-jual-senjata-ke-suriah>, diakses pada 16 Oktober 2015.

²⁰ Nunun. Rusia Tetap Tolak Sanksi Terhadap Suriah, Tersedia pada <http://www.suarakaryaonline.com> Rabu, diakses pada 16 Oktober 2015.

Pada tahun 2013 lalu Rusia bersama Tiongkok memberikan peringatan kepada Amerika Serikat bahwa akan ada konsekuensi yang akan diterima apabila Amerika Serikat melakukan serangan udara di Suriah.²¹ Dengan adanya statemen tersebut membuat Amerika Serikat semakin memperlihatkan bahwa mereka tidak akan terintimidasi oleh ancaman yang dilayangkan Rusia. Terkait operasi militer Rusia di Suriah, akhirnya Amerika Serikat harus menerima kompromi dengan menyepakati regulasi bersama keamanan wilayah udara Suriah. Juru bicara Pentagon Peter Cook menyebutkan, ini merupakan langkah signifikan, untuk mencegah insiden udara antara pilot Amerika Serikat dan pilot Rusia yang melancarkan serangan ke sasaran yang berbeda. Moskow juga mengkonfirmasi disepakatinya *memorandum of understanding* (MOU) dengan Pentagon.²² Hal ini menjadikan sensitifitas kedua negara meningkat dalam keamanan di Suriah.

²¹ <http://indonesia.rbth.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2015.

²² Suriah Tetap Membara, Rusia dan AS Sepakati Keamanan Udara tersedia pada <http://www.dw.com/id/suriyah-tetap-membara-rusia-dan-as-sepakati-keamanan-udara/a-18794654> diakses pada 23 Oktober 2015.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya adalah **Mengapa Rusia memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB S/2011/612 dalam krisis Suriah?**

D. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN/ LANDASAN TEORI

Seperti yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, sehingga dalam tulisan ini, penulis menggunakan Kerangka Dasar Pemikiran:

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional dijelaskan pertama kali oleh Hans J. Morgenthau dengan pendekatan Realisnya. Realis memahami kepentingan nasional sebagai upaya untuk mendapatkan *power*. *Power* merupakan segala;la sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara lain, hal ini dapat dilakukan dengan teknik pemaksaan ataupun kerjasama, dan juga ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan sekaligus untuk survive dalam politik internasional.²³

Dalam kamus Hubungan internasional, Jack C. Plano menulis bahwa, Kepentingan Nasional atau *National interest* adalah tujuan mendasar serta faktor saling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, juga merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan

²³ Rosalia Jasmine. "Kepentingan Internasional". 2013. Pada http://rosaliajasmine-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84819.html . Diakses 30 Desember 2015.

unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.²⁴ Untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut, karena kepentingan yang ingin dicapai harus didukung dengan kebijakan yang dapat mencapai suatu kepentingan. Saat kepentingan-kepentingan antar negara berlangsung harmonis, maka kerap kali negara-negara akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada, namun apabila terjadi sebaliknya maka akan terjadi persaingan, permusuhan, ketegangan, kekhawatiran, bahkan perang dapat terjadi.²⁵

Dari penjelasan mengenai kepentingan nasional bahwa suatu kepentingan merupakan salah satu cara bagi negara untuk mendapatkan *power*, karena *power* dalam hubungan internasional merupakan penentu posisi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam dunia internasional. Dalam hal ini Rusia sebagai negara dalam masa pengembalian eksistensinya dalam dunia internasional mengimbangi kedudukan *rival* abadinya dalam perang dunia dulu, yakni Amerika Serikat sebagai negara *super power*. Umumnya diketahui bahwa Rusia sebagai negara besar yang kekuatannya tidak perlu ditanyakan lagi. Terbukti dalam krisis Suriah Rusia menjalankan tugasnya sebagai negara besar sekaligus negara yang ingin mengembalikan tempatnya sebagai pemain penting dalam dunia internasional dengan baik. Dengan keberhasilan Rusia mengembalikan posisinya

²⁴ Jack C. Plano, Roy Olton. “*Kamus Hubungan Internasional*”. 1982. Cho Pres Ltd. England. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda. 1999. Putra A Barda. Hlm. 7

²⁵ *Ibid*, hlm. 7.

sebagai pemain penting, maka dengan *power* tersebut memberikan kesempatan bagi Rusia untuk mempengaruhi sudut pandang dunia internasional terhadap negara Beruang Merah tersebut dalam usahanya sebagai *The Great Power State*, bahwa Rusia telah kemabli ke posisi yang dimiliki Uni Soviet dahulu, yang selama ini dipegang oleh Amerika Serikat.

Kepentingan nasional merupakan faktor yang paling kosntan serta sebagai tonggak petunjuk arah bagi pembuat keputusan dalam proses kebijakan luar negeri.²⁶ Seperti yang dilakukan Rusia terhadap pengiriman bantuan militer ke Suriah, hal ini hanya semata-mata untuk melindungi kepentingan nasional Rusia di Suriah.²⁷ dengan sikap Rusia yang *agresif* memberikan bantuan kepada Suriah mempengaruhi posisi rusia sebagai negara yang memiliki hubungan *history* dengan Suriah yakni memperat hubunga antar kedua negara, ini bisa membuat Rusia bisa mempertahankan investasinya yang memberikan keuntungan bagi perekonomian Rusia, selain itu hubungan Rusia di Suriah juga mempengaruhi posisi Amerika Serikat di negara yang sedang mengalami krisis tersebut. Melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mencapai kepentingan Rusia dalam krisis Suriah.

²⁶ Ibid, hlm. 7.

27

[Victor Maulana](http://international.sindonews.com/read/1049273/41/ini-alasan-rusia-kerahkan-kekuatan-militer-ke-suriah-1443606412). 2015 “*Ini Alasan Rusia Kerahkan Kekuatan Militer ke Suriah*” pada <http://international.sindonews.com/read/1049273/41/ini-alasan-rusia-kerahkan-kekuatan-militer-ke-suriah-1443606412>. Diakses 30 Desember 2015.

2. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Menurut K. J. Holsti dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisa*, adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu:

1. Orientasi Kebijakan Luar Negeri
2. Peran Nasional
3. Tujuan
4. Tindakan

Adapun orientasi dalam kebijakan luar negeri adalah (a) isolasi, (b) nonblok, (c) pembentukan koalisi dan aliansi.²⁸ Kebijakan yang digunakan oleh Rusia pada krisis yang terjadi di Suriah yakni berorientasi pada pembentukan koalisi dan aliansi. Dimana pemerintah yang berusaha membangun koalisi diplomatik atau aliansi militer yang permanen mengasumsi bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka, mempertahankan kepentingan mereka, atau menghalangi ancaman yang dirasakan memobilisasi kemampuan mereka sendiri.²⁹ Melihat bahwa koalisi yang dilakukan oleh Rusia terhadap pemerintah Suriah berupa kerjasama dalam peralatan perang, ini dilakukan karena keduanya memiliki

²⁸ K.J.Holsti "*Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*" terjemahan Edisi keempat jilid 1, university Of British Columbia, 1988.

²⁹ Ibid

tujuan masing-masing, melihat dari Rusia bahwa dengan adanya kebijakan seperti ini memberikan keuntungan bagi Rusia. Kemudian pemerintah Suriah juga mendapatkan keuntungan, dengan adanya kiriman senjata dari Rusia bisa digunakan untuk menjaga stabilitas keamanan dari serangan yang dilakukan oleh kelompok oposisi.

Peran Nasional dalam Kebijakan Luar Negeri menurut Holsti adalah output kebijakan luar negeri yang hanya dikaitkan dengan negara yang terlibat dalam masalah sistem dan regional. Peran nasional juga pada umumnya merupakan “pembela regional” yaitu peran melindungi negara lain dalam suatu wilayah yang tertentu atau “mediator” yaitu peran membantu menyelesaikan konflik internasional.³⁰ Dari penjelasan di atas bahwa peran dalam kebijakan luar negeri Rusia dalam krisis Suriah dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan Rusia seperti memposisikan dirinya sebagai “mediator” dengan menawarkan intervensi militer dengan tujuan pemecahan konflik.

Tujuan Kebijakan Luar Negeri menurut Richard C. Snyder yang ditulis dalam buku K.J.Holsti adalah suatu gambaran keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah, melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.³¹ Kategori tujuan kebijakan luar negeri Rusia adalah tujuan jangka panjang, yakni rencana, impian

³⁰ K.J.Holsti “*Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*” terjemahan Edisi keempat jilid 1, university Of British Columbia, 1988. Hal. 128-129.

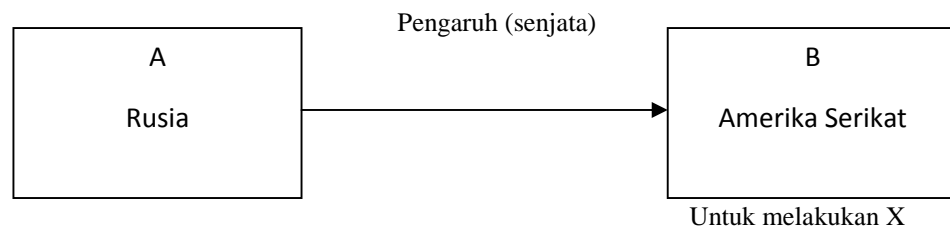
³¹ Ibid. Hal. 137.

dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu didalamnya.³² Jika tujuan menurut Holsti ini diterapkan dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia maka sudah jelas bahwa tujuan Rusia yakni memperkuat posisinya sebagai negara yang dapat mengimbangi kekuatan Amerika Serikat baik dimata internasional dan keanggotannya dalam Dewan Keamanan PBB. Tujuan yang lain adalah Rusia ingin mempertahankan hubungan bilateral yang secara history sudah lama terjalin dengan pemerintah Suriah.

Kebijakan Luar Negeri juga mengandung komponen *tindakan*. Menurut K.J.Holsti, tindakan merupakan hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan juga merupakan bentuk komunikasi untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pemerintah yang bersangkutan. Dalam dunia internasional diantara *tindakan* yang dimaksud seperti propaganda, peragaan kekuatan militer, penggunaan hak veto di Dewan Keamanan, dll.³³ Salah satu tindakan yang disebutkan telah dilakukan oleh Rusia kepada Amerika Serikat dalam krisis Suriah, yakni menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi yang diajukan Amerika Serikat kepada Dewan Keamanan dalam menangani krisis Suriah.

³² Ibid. Hal. 147

Untuk membantu pemahaman tentang *Tindakan Kebijakan Luar Negeri* dapat difahami melalui skema sebagai berikut:



Proses politik internasional mulai bila negara A (Rusia) berusaha melakukan berbagai tindakan untuk mengubah atau mendukung perilaku negara lain. Dalam hal ini Rusia mendukung Pemerintah Suriah untuk melawan kelompok Oposisi. Dengan demikian kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain.

Dari skema yang dikutip dari definisi *tindakan* oleh K.J.Holsti diatas, dapat ditarik penjelasan bahwa: (1) *Pengaruh* merupakan aspek kekuasaan pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, dalam hal ini bantuan berupa peralatan perang bisa dikatakan sebagai alat yang digunakan Rusia untuk mencapai tujuannya yakni melakukan intervensi militer ke Suriah. (2) negara A (Rusia) mampu membuat kebijakan dalam tindakannya mempengaruhi pemerintah Suriah sehingga membuat negara B (Amerika Serikat) melakukan X, yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah berupa pengajuan resolusi yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB agar tidak adalagi bantuan dalam bentuk militer ke Suriah, karena tindakan yang dilakukan Rusia dianggap melanggar peraturan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan dikecam oleh dunia internasional. tindakan-tindakan Rusia terhadap Suriah jelas mempengaruhi

hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat. Tindakan mempengaruhi Amerika, jelas akan mempengaruhi hubungan Rusia dengan Amerika, meskipun yang akan terlihat nanti adalah suatu hubungan yang lebih tertutup atau tidak menyangkut komunikasi terbuka, dilihat dari periode waktu yang meliputi hubungan tersebut, sehingga dapat dinyatakan suatu proses.³⁴ Apabila Rusia dapat membuat Amerika melakukan sesuatu, tetapi Amerika tidak dapat membuat Amerika melakukan hal serupa, maka dapat dikatakan bahwa Rusia lebih berkuasa daripada Amerika, oleh karena itu kekuasaan dapat juga dilihat sebagai kuantitas, namun kuantitas hanya bermakna bila dibandingkan dengan kekuasaan pihak lain, karena kekuasaan bersifat relatif.³⁵ Pada krisis yang terjadi di Suriah terlihat bahwa Rusia lebih mendominasi dalam hal intervensi, sebab bantuan Rusia kepada pemerintah Bashar al-Assad semakin hari semakin meningkat dan membuat pihak pemerintah semakin kuat, terbukti hingga sekarang pelengseran Bashar al-Assad belum bisa dilakukan.

E. HIPOTESA

³⁴ Ibid, hlm. 160.

³⁵ Ibid, hlm. 160.

Dari Latar Belakang Permasalahan dan Kerangka Dasar Pemikiran yang sudah dipaparkan, penulis dapat menarik Hipotesa pada judul **Kebijakan Rusia Di Dewan Keamanan PBB terhadap Amerika Serikat dalam Krisis Suriah tahun 2011-2014** adalah:

1. Rusia ingin meminimalisasi intervensi Amerika Serikat yang selama ini menduduki posisi penting dalam konflik di Timur Tengah, dengan memberikan bantuan militer ke Suriah.
2. Mempertahankan mitra Aliansi dalam ekonomi dan militer yang telah terbentuk sejak zaman Uni Soviet dan melindungi investasinya.
3. Keinginan Rusia untuk kembali bermain sebagai *great power state*, dimana Rusia dapat mengimbangi *bergining position* Amerika dalam dunia internasional.

F. TUJUAN PENELITIAN

Harapan penulis dalam skripsi ini adalah pembaca dapat mengetahui kebijakan apa saja yang diambil Rusia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB terhadap kasus Suriah, dan hubungan Rusia dengan Amerika Serikat yang sama-sama ingin melakukan intervensi dan mendukung kelompok yang berlawanan. Serta pembaca dapat mengetahui tujuan Amerika Serikat dalam mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB perihal sanksi militer, terhadap Suriah.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkaun penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB terhadap Amerika Serikat dalam krisis Suriah. Pada penulisan ini juga dibatasi oleh fakta-fakta yang terjadi dalam krisis Suriah kurun waktu antara tahun 2011 hingga 2014. Dan langkah-langkah Dewan Keamanan PBB serta negara anggotanya sebagai organisasi perdamaian dunia dalam menghentikan konflik di Suriah.

H. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deskriptif kualitatif*, melalui teknik pengumpulan data *library research* dengan pengumpulan data melalui buku, jurnal, artikel, sumber informasi seperti media cetak, media elektronik, sehingga pembaca mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

I. RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan dalam skripsi yang berjudul “**Kebijakan Rusia di Dewan Keamanan PBB terhadap Amerika Serikat dalam krisis Suriah tahun 2011-2014**” adalah sebagai berikut:

1. BAB 1

Pendahuluan berisi : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran / Landasan Teori, Hipotesa. Tujuan Penelitian, Ruang lingkup, Metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

2. BAB II

Bab II Berisi tentang Kebijakan Rusia dalam intervensi pada krisis Suriah. Karena dalam skripsi ini yang menjadi subjek penelitian adalah Rusia yang menggunakan posisinya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dalam intervensi ke Suriah.

3. BAB III

Bab III akan menjelaskan tentang Amerika dan Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap sanksi Militer Suriah. Pada bab III ini penulis akan mencoba untuk mengulas tujuan Amerika mengambil tindakan-tindakan yang dapat mendesak Suriah sebagai negara konflik dan Rusia sebagai investor kuat dalam bantuan militer ke Suriah, dimana hal ini dapat mengganggu posisi Amerika untuk melakukan intervensi ke Suriah.

4. BAB IV

Bab IV akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Rusia memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada bab ini akan menjawab Rumusan Masalah dan hipotesa dalam Skripsi ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam Latar Belakang bahwa Rusia telah menggunakan hak vetonya untuk menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Amerika Serikat, ini membuat hubungan kedua negara sebagai anggota Dewan Keaman PBB terlihat kurang harmonis.

5. BAB V

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya.

6. Daftar Pustaka